

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2014

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka berikut ini diinformasikan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2014 ini merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang ruang lingkup pembahasannya mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

A. GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE

Kota Parepare secara geografis terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, maka Kota Parepare ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan. Pemaknaan pusat pelayanan antar wilayah diterjemahkan oleh Pemerintah daerah Kota Parepare dalam visinya sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, religius dan berkomitmen Lingkungan.

Dengan luas 99,33 Km², Kota Parepare berada pada posisi 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur, dengan kondisi topografi secara umum terbagi dalam 2 (dua) morfologi, yakni; dataran dan perbukitan. Secara administratif, Kota Parepare terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan.

Berdasarkan hasil Proyeksi penduduk Kota Parepare, penduduk kota Parepare Tahun 2013 berjumlah 135.200 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan.

Dari 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare, Kecamatan Soreang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.551 jiwa. Disusul

kemudian oleh Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 40.908 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 33.570 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 15.171 jiwa.

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Soreang, yaitu 5.468 jiwa/km², dan yang terendah adalah Kecamatan Bacukiki, yakni sebesar 227 jiwa/km².

Penduduk Usia Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) yang ada di Kota Parepare berjumlah 92.345 orang yang terdiri dari 53.678 orang angkatan kerja dan 39.327 orang bukan angkatan kerja. Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,86 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Parepare mencapai angka 7,92 persen sedangkan di tahun 2013 telah mencapai angka 8,47 persen.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 serta Persentase Perkembangan dan Pertumbuhan Tahun 2009-2013

Tahun	PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	Perkembangan Ekonomi (%)	PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	1.519.156,10	16,97	707.234,86	7,93
2010	1.796.670,56	18,22	767.162,91	8,41
2011	2.073.555,94	15,46	826.486,23	7,79
2012 ^{*)}	2.376.530,24	14,61	891.923,11	7,92
2013 ^{**)}	2.771.804,96	16,63	967.507,82	8,47
Rata-Rata	XXX	16,38	XXX	8,10

Sumber data: Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2014

*) Angka Sementara

***) Angka sangat sementara

PDRB perkapita Kota Parepare setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Selama tahun 2009-2013, PDRB perkapita Kota Parepare meningkat dari Rp. 12.782.990,02 menjadi Rp. 20.502.729,16 dengan rata-

rata PDRB perkapita selama lima tahun tersebut sebesar Rp. 16.211.751,01. Namun angka tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp. 12.567.363,67 pada tahun 2009 dan Rp. 22.150.805,32 pada tahun 2013 dengan rata-rata sebesar Rp. 14.516.349,9.

Untuk melihat keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia di suatu Negara atau wilayah, dapat diukur dengan menggunakan *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah melaksanakan kerjasama pengkajian dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kinerja pembangunan selama ini dalam kurun waktu tertentu menggunakan Parameter IPM atau HDI, dengan menggunakan 3 (Tiga) indikator yaitu: i) Indeks Kesehatan, dengan pilihan angka harapan hidup, ii) Indeks Pendidikan, dengan pilihan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, iii) Indeks Paritas Daya Beli. Hasil kajiannya telah dipublikasikan melalui penerbitan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun 2013, dengan hasil-hasil sebagai berikut :

1. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (e_0) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Pada tahun 2013 angka harapan hidup Kota Parepare tercatat sekitar 75,04 tahun, meningkat dibanding tahun 2012 yang besarnya sekitar 74,71 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin baik dalam kurun waktu 2012-2013. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2013, tampak bahwa Angka Harapan Hidup Kota Parepare masih lebih tinggi. Pada tahun 2012 Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan adalah sekitar 70,45 tahun sedangkan tahun 2013 sekitar 70,60 tahun.

2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan terdiri dari dua unsur yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, komponen angka melek huruf pada tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan dari 97,33 persen menjadi 97,36 persen. Sementara itu, indikator penting lainnya yang tidak kalah penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini dapat

memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Parepare yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2013 ini meningkat menjadi 9,88 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012 sebesar 9,91 persen. Dengan melihat angka tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 2012 penduduk Kota Parepare rata-rata menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD dan SMP, demikian juga pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota lainnya maka angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Parepare berada di atas rata-rata angka Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 8,01 persen. Fenomena ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Parepare dibidang pendidikan sudah semakin baik.

3. Indeks Paritas Daya Beli

Komponen PPP (*Purchasing Power Parity*) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, dalam laporan ini digunakan PDRB riil perkapita. Penggunaan PDRB riil perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi susenas) belum dapat mengestimasi sampai dengan level kabupaten/kota. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kota Parepare dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai indikator standar hidup layak. Daya beli penduduk Kota Parepare pada tahun 2013 sekitar 648,80 ribu rupiah, sedangkan pada tahun 2012 sekitar 646,40 ribu rupiah. Sementara itu, rata-rata daya beli penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sekitar 646,71 ribu rupiah, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 643,59 ribu rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare pada tahun 2012 sekitar 78,63 mengalami peningkatan menjadi 79,02 pada tahun 2013. Posisi IPM Kota Parepare pada tahun 2013 berada pada peringkat ke 2 (dua) dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013 posisi IPM Kota Parepare sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dan masih lebih tinggi dari rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (73,28). Hal ini diduga karena adanya kesadaran masyarakat Parepare akan pentingnya kesehatan yang tercermin pada meningkatnya angka harapan hidup, kesadaran akan pentingnya pendidikan yang tercermin pada meningkatnya angka melek huruf, dan daya beli masyarakat yang

semakin tinggi. Sedangkan secara nasional, IPM Kota Parepare menduduki peringkat kesembilan belas. IPM Kota Parepare tergolong IPM menengah, baik pada tahun 2012 maupun tahun 2013.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Kota Parepare adalah “Terwujudnya Masyarakat Maju Yang Religius Dan Berdayatahan Lingkungan”, dimana RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 merupakan tahapan kedua dan ketiga pentahapan pembangunan daerah sebagaimana diatur di dalam RPJPD Kota Parepare. Oleh karena itu Visi Pembangunan Kota Parepare didalam RPJMD Tahun 2013-2018 harus tetap mengacu pada Visi yang ada di dalam RPJPD Kota Parepare tersebut serta arahan-arahan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah (Hasil Pemilihan Kepala Daerah), dimana didalam Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih harus menggambarkan arah pembangunan daerah atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Oleh karena itu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye maka ditetapkan Visi Pembangunan Kota Parepare untuk Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat”

Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 di atas, memiliki makna :

- a. ***Maju***, mengandung arti: mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.
- b. ***Peduli***, mengandung arti: mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan.
- c. ***Mandiri***, mengandung arti: mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

- d. **Bermartabat**, mengandung arti: harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.
- b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- c. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.
- d. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.
- e. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.

Tujuan dan Sasaran

Untuk melaksanakan kelima misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.

Tujuan :

1. Pemerataan layanan pendidikan menuju masyarakat yang cerdas.

Sasaran :

- Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.

2. Pemerataan layanan kesehatan menuju masyarakat yang sehat.

Sasaran :

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi Kedua : Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan :

1. Akselerasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkesinambungan.

Sasaran :

- Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sasaran :

- Meningkatkan ketersediaan pangan utama dengan harga terjangkau.

Misi Ketiga : Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.

Tujuan :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup.

Sasaran :

- Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Meningkatnya ketersediaan air bersih.
- Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.

Misi Keempat : Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat.

Tujuan:

1. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat

Sasaran :

- Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah

3. Mewujudkan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran:

- Meningkatnya kesetaraan gender.
- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Misi Kelima : Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.

Tujuan :

Mewujudkan masyarakat Parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya

Sasaran :

- Terjaganya kerukunan antar umat beragama
- Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. Strategi

Misi ke-1

1. Penghapusan biaya-biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa/orang tua siswa (Usia Dini s/d SMA).
2. Pemberian motivasi kepada anak untuk terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
3. Pengembangan sarana pendidikan dan informatika.

1. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat Parepare.
2. Pengembangan sarana penunjang kesehatan masyarakat.

Misi ke-2

1. Peningkatan nilai tambah hasil kegiatan perekonomian daerah.
2. Intensifikasi dan diversifikasi bahan pangan utama.

Misi ke-3

1. Pengembangan infrastruktur kawasan budidaya kota.
2. Peningkatan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam dan Mineral.
3. Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Misi ke-4

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah).
2. Peningkatan keahlian dan profesionalisme aparatur.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat penyusunan proses pembangunan.
4. Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan anak serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Misi ke-5

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
2. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DESENTRALISASI)

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Parepare tahun 2014, berikut uraian capaian pelaksanaan program-program pembangunan menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018.

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan.

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan ini sebesar Rp. 274.503.524.288,- dengan realisasi Rp.220.675.509.094,- atau 80,39 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, antara lain :

- a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya pemberian beasiswa kepada siswa SD/SMP yang berprestasi sebanyak 68 orang dan siswa SD/SMP kurang mampu sebanyak 505 orang serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik dalam penyelenggaraan e-education dan e-learning sebanyak 20 orang.
- b) Program Pendidikan Menengah yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya pemberian beasiswa kurang mampu sebanyak 185 orang dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dalam penyelenggaraan e-education dan e-learning sebanyak 330 orang.
- c) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya penyelenggaraan pembinaan adiwiyata dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan

tenaga pendidik menyusun bahan ajar berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 40 orang.

2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD A. MAKKASAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp.143.153.943.039,- dengan realisasi Rp.140.179.577.285,- atau 97,92 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dilaksanakan dalam kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan tujuan untuk mendukung ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di seluruh puskesmas wilayah Kota Parepare.
- b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya pemberian pelayanan ambulance gratis untuk masyarakat Parepare diseluruh PKM dan penyelenggaraan layanan call centre 112.
- c) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan dalam kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk yang dilaksanakan di wilayah yang ada penderita DBD, pengadaan vaksin penyakit menular, pelayanan Kesehatan Haji berupa pemberian vaksin meningitis, pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV, pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular seksual (IMS), penyakit TB Paru dan penyakit TB Kusta.
- d) Program pengadaan peningkatan, sarana dan prasana sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit berupa Deferillator, BDG 12 Channel, Bfankard With Realing, BDG 5 Channel, Emergency Trolley, Appendectomy Set, Minor Set, Pengadaan alat Ponek, Retail Monitor (CTG), Emergency Trolley dan Meco Caesaran, pengadaan Incinerator dan pengadaan alat-alat kedokteran berupa Nebulizer Portable, Mesin Anastesi 2 Vaporizer, Transfer Stretcher, Ventilator Mobile, Mesin Hemodialisadan UnitCPAP.

3. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.618.058.235,- dengan realisasi Rp.14.029.517.121,- atau 95,97 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air dengan capaian tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Program peningkatan pengendalian polusi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair terhadap tingkat pencemaran lingkungan sebanyak 82 titik.
- c) Program pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya inventarisasi dan labelisasi pohon sebanyak 500 pohon, pembuatan taman kering dan rehab taman kolam air mancur serta pemeliharaan 41 titik taman kota.
- d) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan meliputi penyediaan 24 unit bak sampah fiber.

4. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang serta Pengawasan Bangunan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.69.643.980.545,- dengan realisasi anggaran Rp.60.914.825.898,- atau 87,47 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan tingkat capaian kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan tahun 2014 ini yaitu :
 - 1) Pembangunan jalan beton Mattirotasi sepanjang 850 meter
 - 2) Perintisan Jalan sepanjang 617,4 meter
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar sepanjang 477,03 meter
 - 4) Pembangunan akses PPI – perbatasan Pinrang sepanjang 167 meter.
- b) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong. Adapun capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :
 - 1) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 949,5 mtr
 - 2) Pembangunan / Rehabilitasi Duiker sebanyak 1 unit (15,09) M³.
 - 3) Pembangunan Drainase/saluran air sepanjang 3.463,23 meter
 - 4) Rehabilitasi Saluran / Drainase Jl. Kesuma Timur sepanjang 292,66 meter
 - 5) Pembangunan Plat Penutup drainase sepanjang 1.046,6 meter.

- c) Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan. Program ini meliputi beberapa kegiatan yaitu :
 - 1) Revitalisasi Lapangan Andi Makkasau dalam bentuk pembangunan pagar, panggung upacara dengan luasan pekerjaan 430,27 M²
 - 2) Pembangunan landasan Patung Cinta Ainun Habibie
 - 3) Pembangunan Parepare Beach City dengan pekerjaan pembuatan 6 unit food court.
- d) Program pemeliharaan jalan umum yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya pengadaan dan pemasangan lampu hias sebanyak 37 titik di jalan Bau Massepe Kelurahan Lumpue.

5) Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.7.591.722.334,- dengan realisasi anggaran Rp.7.003.322.822,- atau 92,25 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program peningkatan kawasan perkotaan dengan kegiatan peningkatan kawasan permukiman, yaitu peningkatan dan perbaikan jalan setapak (paving blok) dan pemasangan lampu lorong di 13 kelurahan.
- b) Program Pemanfaatan Ruang dengan beberapa kegiatan diantaranya finalisasi peta administrasi, peta struktur ruang dan peta pola ruang RTRW Kota Parepare yang menghasilkan lampiran peta Rencana Tata Ruang Wilayah, Peta A0 (Peta Rencana dan Peta Administrasi) dan Peta A3.
- c) Program peningkatan dan pelayanan perizinan dengan kegiatan pemutakhiran data jumlah bangunan perumahan dan permukiman Kota Parepare.
- d) Program perencanaan tata ruang, dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan evaluasi Perda ruang terbuka hijau.

6) Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.5.492.173.449,- dengan realisasi anggaran Rp.5.009.715.479,- atau 91,22 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan diantaranya penyusunan rancangan RPJMD dengan hasil ditetapkannya perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2013-2018.
- b) Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan diantaranya penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kota Parepare Tahun 2013-2025.
- c) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan kegiatan diantaranya percepatan pembangunan sanitasi perkotaan, penyusunan dokumen memorandum program sektor sanitasi dan studi kelayakan proteksi Sungai Karajae dalam rangka penyusunan dokumen kelayakan tentang pemanfaatan Sungai Karajae.

7) Penyelenggaraan Urusan Perumahan.

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.2.027.721.500,- dengan realisasi anggaran Rp.1.997.196.600,- atau 98,49 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, antara lain :

- a) Program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan pembuatan sumur umum dan MCK pada empat kecamatan.
- b) Program Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Permukiman dengan kegiatan pemantauan penertiban bangunan dalam kota agar tidak menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah serta tindak lanjut pendataan bangunan dalam rangka pengumpulan data dan informasi mengenai klasifikasi jenis bangunan dan jumlah bangunan yang memiliki serta belum memiliki IMB.

8) Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.2.666.643.913,- dengan realisasi anggaran Rp.2.570.842.542,- atau 96,41 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan terwujud dengan terlaksananya pemilihan pemuda pelopor, pelatihan paskibraka dengan peserta sebanyak 64 orang dan Pelatihan Aubade dengan peserta sebanyak 100 orang.

- b) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga dengan melaksanakan kompetisi olahraga antar pelajar.

9) Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.280.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.226.622.275,- atau 80,94 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan bagi usaha menjahit sebanyak 5 unit, gerobak jualan sebanyak 15 unit dan pelatihan manajemen usaha bagi UKM sebanyak 30 orang.
- b) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, dilaksanakan dalam kegiatan keikutsertaan dalam pameran dalam rangka hari HUT Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Makassar dan penyusunan data base jumlah UMKM yang ada di Kota Parepare.

10) Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.2.973.869.006,- dengan realisasi anggaran Rp.2.377.296.648,- atau 79,94 persen yang dilaksanakan dalam program penataan administrasi kependudukan melalui kegiatan pengadaan blanko Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Capil dan tersedianya buku akta nikah gratis.

11) Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.713.572.312,- dengan realisasi anggaran Rp.4.613.357.615,- atau 97,87 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat melalui pembuatan souvenir dari

kerang-kerangan-kerangan yang diikuti 15 orang peserta berasal dari Cempae Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang.

- b) Program peningkatan kesempatan kerja. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya peyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dengan hasil kegiatan tersedianya informasi lowongan pekerjaan yang antara lain Jumlah pencari kerja sebanyak 1732 orang, Jumlah penempatan tenaga kerja sebanyak 905 orang.
- c) Program perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan pelaksanaan penyuluhan pencegahan HIV/AIDS sebanyak 60 peserta dari pekerja dan pengusaha antara lain perhotelan, panti pijat, rumah beryanyi dan perusahaan lainnya.

12. Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan

Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.3.577.462.876,- dengan realisasi anggaran Rp.3.414.348.406,- atau 95,44 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan diantaranya :

- a) Program peningkatan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya penyusunan analisis ketersediaan pangan dan neraca bahan makanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan pangan tahun 2014 berada pada angka rata-rata 26,346 ton pertahun atau 190,32 kg/kap/hari dari jumlah penduduk 135.200 jiwa, penanganan balita gizi kurang atau buruk dengan pemberian makanan tambahan dan pendampingan dan terbentuknya Kebun Bibit Desa yang berlokasi di Bumi Harapan.

13) Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.5.998.228.362,- dengan realisasi anggaran Rp.4.495.204.073,- atau 74,94 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang dilaksanakan dalam kegiatan antara lain sosialisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) yang diikuti oleh 40 orang perwakilan masing-masing

kelurahan tentang mekanisme pelayanan pengaduan dan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya.

- b) Program keluarga berencana dengan kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin serta peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi.
- c) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri dengan kegiatan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan melibatkan beberapa instansi terkait antara lain dokter, bidan klinik, TNI, Polisi, PKK, Camat dan Lurah se Kota Parepare serta pendataan keluarga dan pasangan usia subur, peserta KB aktif dan baru serta pendataan keluarga pra sejahtera I, II dan III.

14) Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.5.919.251.444,- dengan realisasi anggaran Rp.5.754.356.922,- atau 97,21 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dengan kegiatan rehab atap pelataran bawah terminal induk dan pemeliharaan rambu jalan sebanyak 20 buah.
- b) Program peningkatan pelayanan angkutan dengan kegiatan pengadaan rambu-rambu jalan sebanyak 50 buah, Pengadaan Warning Light sebanyak 1 set, pengadaan cermin tikung/delimitator, sebanyak 5 unit dan pengadaan marka Jalan sepanjang 2,600 Meter.

15) Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.5.150.839.034,- dengan realisasi anggaran Rp.2.720.289.950,- atau 52,81 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan kerjasama Informasi dengan mas media berupa pelayanan internet keliling ditiap kecamatan, penyediaan bank data Pemerintah Daerah dan media informasi kepada masyarakat melalui Website Pemerintah Kota Parepare dan penyampaian informasi pembangunan melalui siaran Radio Suara Bandar Madani.

16) Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.5.727.227.006,- dengan realisasi anggaran Rp.5.493.991.911,- atau 95,93 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan pembentukan tim koordinasi anggota intelejen daerah (KOMINDA) dan pertemuan berkala Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi-potensi konflik yang terjadi di masyarakat serta penertiban dan penegakan Peraturan Daerah.
- b) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) yang bertujuan membangun, memelihara, kerukunan ummat beragama dan forum silaturahmi tokoh masyarakat, pengurus organisasi agama, suku, etnis dengan Pimpinan Daerah.
- c) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dilaksanakan dalam bentuk lomba Pos Kamling terbaik tingkat kota Parepare.

20) Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) SKPD, diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, 4 (Empat) Kecamatan, Kantor Pelayanan Perizinan, Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretariat Korpri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.820.639.950,- dan realisasi sebesar Rp.110.671.919.471,- atau 87,96% dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- 1) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
 - a) Pembebasan lahan kawasan hutan jompiE seluas $\pm 1.950 \text{ m}^2$ yang terdiri atas nama H. Muchtar Salihu dengan luas 450 m², Tappi dengan luas 450 m², Pasang Tiri dengan luas 450 m², Ali Bin Ali dengan luas 225 m² dan H. Muslimin Mala dengan luas 375 m².

b) Pensertifikatan tanah asset pemda yang terdiri atas Bangunan TPI di Kelurahan Sumpang MinangaE, Bangunan Rumah Dinas Pemakaman Pahlawan di Kelurahan Sumpang MinangaE, Kantor Penyuluh KB di Kelurahan Sumpang MinangaE, Bangunan SDN 65 di Kelurahan Sumpang MinangaE Kecamatan Bacukiki Barat, Bangunan Rumah Kepala Dinas Kesehatan di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, Bangunan SDN 88 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat, Kompleks Sekolah Luar Biasa di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Bangunan SDN 27 di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang seluas, Kantor Dinas Kebersihan di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung, Kantor Pelayanan Perizinan di Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung, Bangunan Rumah Jabatan Wakil Walikota Parepare di Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung, Bangunan Kantor Kelurahan Mallusetasi di Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung, Bangunan Rumah Dinas di Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung dan Bangunan SDN 21 di Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung.

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan yaitu Publikasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk operasional Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) melalui internet.

3) Program kerjasama informasi dengan media massa dengan kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Kontrak Halaman Bandar Madani) dengan output termuatnya berita-berita kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang di enam media harian, yakni Harian Pare Pos, Harian Fajar, Harian Tribun Timur, Harian Berita Kota Makassar, Harian Ujung Pandang Ekspres, Harian Ajatappareng, Rakyat Sulsel, SKU Semangat Pagi dan Radio Mesra FM.

4) Program Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan diantaranya MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengikuti 22 jenis lomba dari 40 jenis yang diperlombakan serta

berhasil meraih Juara Harapan III untuk Lomba Khath Al-Qur'an Hiasan Maushaf Putra dan pemberian biaya transportasi kepada Imam Masjid, Pegawai Syara Masjid, Guru Mengaji Kampung, Guru Mengaji TKA/TPA, Anak Panti Asuhan, Orang Tua Jompo dan Guru Sekolah Minggu.

- 5) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan diantaranya rehabilitasi ruang kerja Walikota Parepare dan pembangunan tanggul tempat parkir Kantor Walikota serta pengadaan mobiler ruang rapat Walikota.
- 6) Program peningkatan dan pengembangan produksi daerah dengan kegiatan diantaranya penyaluran beras untuk keluarga miskin (RASKIN) dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) Penerima manfaat RASKIN sebanyak 4.965 RTS dan program pameran promosi dan potensi pembangunan daerah dengan mengikuti pameran SIDE Sulawesi 2014 di Sulawesi Selatan dan Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun 2014.
- 7) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan diantaranya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, Aplikasi SIPKD berbasis akrual dengan capaian tersedianya sarana dan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis Akrual.
- 8) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Lakip dan Rencana Kerja Tahunan dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2014 di beberapa SKPD yang melaksanakan pelayanan publik.
- 9) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan diantaranya penertiban barang milik daerah, yaitu pelaksanaan penertiban aset pemerintah daerah baik berupa tanah, bangunan dan kendaraan dinas, penyusunan neraca aset daerah serta pelaksanaan sensus barang milik pemerintah daerah.

- 10)** Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan Intensifikasi PAD, sosialisasi pajak bumi dan bangunan serta pajak sarang burung wallet, sosialisasi PP No.91 Tahun 2010 tentang penerapan sistem self assesment.
- 11)** Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan kegiatan diantaranya pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan publikasi peraturan perundang-undangan.
- 12)** Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sinergitas Pelaksanaan Pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yaitu sinergitas dengan BPKP untuk melakukan reuiu laporan keuangan pemerintah Kota Parepare.
- 13)** Program pembinaan dan pengembangan aparatur yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan realisasi jumlah pelamar 3.089 orang dan dinyatakan lulus sebanyak 52 orang, proses penanganan kasus-kasus disiplin PNSD, pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas untuk Strata 2 sebanyak 2 orang dan siswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial sebanyak 3 orang.
- 14)** Program mengintensifkan penanganan pengaduan dengan kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat, pembinaan lmtag dan organisasi kemasyarakatan, peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RT/RW, Imam mesjid dan Kelurahan, Intensifikasi penagihan PBB dan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan.
- 15)** Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan kegiatan penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik untuk penyusunan kebijakan pelayanan publik dibidang perizinan dan non

perizinan yang berstandar sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dan penyempurnaan maintenance software dan hardware sistem layanan Local Areal Network terhadap layanan publik.

- 16) Program fasilitas pindah/purna tugas PNS yang dilaksanakan dalam kegiatan prosesi pemakaman jenazah anggota KORPRI (PNS lingkup pemerintah kota).

21) Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.558.345.996,- dan realisasi sebesar Rp.3.424.983.712 atau 96,25 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan diantaranya perbaikan rumah sebanyak 55 Keluarga Miskin, penyediaan jamban sebanyak 42 keluarga miskin dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan melalui kegiatan Lomba Kelurahan dimana Kota Parepare sebagai juara I Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan sekaligus mewakili Propinsi ke Tingkat Nasional.
- b) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa/Kelurahan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyusunan profil kelurahan.

22) Penyelenggaraan Urusan Sosial

Urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.738.422.310,- dan realisasi sebesar Rp.3.999.157.026 atau 84,40 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan kegiatan diantaranya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dengan capaian pemberian bantuan dalam bentuk stimulan berupa peralatan usaha dan pemberian bantuan kebutuhan pokok bagi lansia non produktif.
- b) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan kegiatan peningkatan keterampilan yaitu pelatihan selam tingkat dasar bagi tenaga relawan untuk menangani korban bencana

alam khususnya penyelamatan di air (*water rescue*) dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 50 orang.

23) Penyelenggaraan Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.94.055.000,- dan realisasi sebesar Rp.91.951.250,- atau 97,76 persen dengan pelaksanaan program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data pokok daerah dan penyusunan dokumen Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare.

24) Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.648.401.685,- dan realisasi sebesar Rp.1.585.458.941,- atau 96,18 persen dengan pelaksanaan program antara lain :

- a) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan dilaksanakan dalam kegiatan pengumpulan data kearsipan yang sifatnya in aktif dari tiga puluh empat SKPD dan penyusunan sistem katalog data.
- b) Program peningkatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan kegiatan Pengadaan buku perpustakaan dengan capaian pengadaan buku perpustakaan dengan jumlah eksemplar 1.447 dan judul 295 dan pengolahan pengolahan buku sebanyak 1.791 eksemplar dan 543 judul berdasarkan klasifikasi, katalog, penempelan label, pencatatan, pemberian stempel, kelengkapan buku lainnya dan pengaturan buku cadangan.

25) Penyelenggaraan Urusan Pertanian dan Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.290.402.432,- dan realisasi sebesar Rp.8.481.488.331,- atau 59,35 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dalam bentuk kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan melakukan vaksinasi anthrax, SE dan brucella pada 500 ekor sapi dan vaksinasi Rabies untuk 100 ekor anjing serta pemberian obat cacing dan vitamin untuk 1.000 ekor sapi.

- b) Program pemanfaatan sumber daya hutan dengan output pemeliharaan tanaman, sarana dan prasarana kawasan hutan JompiE seluas 13,5 ha.
- c) Program pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan pengadaan kendaraan roda 2 (alat angkut pemasaran ikan) sebanyak 15 unit, pengadaan cool box sebanyak 64 unit, pengadaan perahu bermesin sebanyak 33 unit, rehabilitasi kantor/pagar PPI dan pembangunan tower air bersih.

26) Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.647.435.000,- dan realisasi sebesar Rp.593.975.175,- atau 91,74 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program pengembangan pemasaran pariwisata, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata yang diwujudkan dengan pelaksanaan pemilihan duta pariwisata kota Parepare dan pelaksanaan promosi pariwisata dengan keikutsertaan Kota Parepare pada kegiatan Apeksi Tahun 2014 di Kota Dumai Propinsi Riau dan Lovely Desember Tahun 2014 di Tana Toraja.
- b) Program pengembangan destinasi pariwisata, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan melaksanakan Festival Salo Karajae dan pembangunan panggung di atas muara Salo Karajae.

27) Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.293.357.013,- dan realisasi sebesar Rp.4.001.676.634,- atau 93,21 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dilaksanakan dalam kegiatan diantaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen. Selama tahun 2014 jumlah pengaduan sebanyak 14 kasus dan terselesaikan sebanyak 11 kasus dan 3 kasus masih dalam proses mediasi.
- b) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dilaksanakan dalam kegiatan diantaranya pelaksanaan operasi pasar sembako sebanyak dua kali.

D. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Selain menyelenggarakan urusan desentralisasi, Pemerintah Kota Parepare juga menyelenggarakan tugas pembantuan yang berasal dari dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Parepare mendapatkan bantuan pendanaan melalui 4 (empat) SKPD untuk menjalankan tugas pembantuan tersebut, yaitu :

1) Dinas Tenaga Kerja

Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk program penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan padat karya infrastruktur. Dari jumlah anggaran dana pembantuan sebesar Rp. 813.265.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.809.529.900,- atau 99,54 persen berupa pembuatan jalan tanah di Kelurahan Wattang Bacukiki, Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki.

2) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan unit organisasi adalah Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.277.332.000.-,- dapat direalisasikan sebesar Rp.4.722.004.100,- atau sebesar 89,48 persen dalam bentuk program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan pembangunan kapasitas masyarakat pesisir serta peningkatan penataan dan pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan.

3) Dinas kesehatan

Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementrian Kesehatan dengan unit organisasi Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp. 755.148.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 753.167.800,- atau 99,74 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pertolongan pada ibu bersalin, kunjungan neonatal pertama balita yang ditimbang.

4) RSU A. MAKKASAU

Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia unit Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebesar Rp.20.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.926.805.450,- atau 99,63 persen yang dilaksanakan dalam bentuk

pengadaan alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan di RSUD. Makkasau.

E. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diantaranya meliputi kerjasama daerah dengan instansi vertikal di daerah, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

1) Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

- a) Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Parepare.
- b) Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan DPD KNPI Kota Parepare.
- c) Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Pramuka Kwarcab Parepare.

2) Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Berkaitan dengan koordinasi dengan instansi vertikal yang terdiri dari Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) dengan tujuan utama pembentukan forum tersebut adalah terpeliharanya kerukunan dan toleransi antar umat beragama dan terciptanya suasana aman dan kondusif di lingkungan Masyarakat Kota Parepare.

3) Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan yang ditempuh untuk percepatan proses penyelesaian masalah batas wilayah antara Kota Parepare dengan kabupaten Sidrap dan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti baik secara yuridis maupun fisik dilapangan. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare dalam rangka penegasan batas daerah dengan Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah penegasan batas daerah tersebut.

4) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2014 telah terjadi bencana angin kencang yang mengakibatkan 454 rumah warga mengalami kerusakan baik rusak berat maupun ringan. Untuk penanggulangan dampak bencana telah diberikan bantuan sebesar Rp.271.000.000,- sebagai bantuan untuk perbaikan rumah dan lain-lain peruntukannya.

5) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kota Parepare sebagai kota yang basis masyarakatnya heterogen mampu menjaga ketentraman dan ketertiban umum dari segala konflik yang berpotensi terjadi. Penguatan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, antar pemuka agama, serta peran aktif masyarakat akan terus dikedepankan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dan pelibatan aparat keamanan dalam hal ini pihak TNI dan Kepolisian melalui Babinsa dan Babinmas.

F. PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam kehidupan masyarakat selama tahun 2014 tidak terlepas dari itikad baik dan kerja keras serta inovasi semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga capaian kinerja selama tahun 2014 merupakan keberhasilan bersama antara Pemda, Legislatif serta masyarakat dan perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Namun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dan belum memuaskan semua pihak, namun apa yang telah dicapai merupakan modal dasar bagi upaya perbaikan maupun penajaman program dan kegiatan Pemerintah Kota Parepare. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah daerah untuk membulatkan tekad dan bekerja keras dalam upaya lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 ini kami publikasikan untuk diketahui oleh masyarakat Kota Parepare pada khususnya dan oleh seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran pendapat ataupun tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan ke depan, dapat menyampaikan melalui SMS CENTRE Pengaduan Masyarakat 081-241350077 atau berkunjung langsung pada kantor kami melalui Bagian Hubungan Masyarakat dan atau pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Parepare Jl. Jenderal Sudirman Nomor 78, Telepon 0421-21157 psw. 230, 231,207,214 Fax 0421-21090.

Sekian dan Terima Kasih!

WALIKOTA PAREPARE,

DR. H. TAUFAN PAWE, SH, MH